

EDISI : Rabu, 13 Maret 2019

KLIPING BERITA MEDIA CETAK KABUPATEN BULELENG



PENYUSUN :
SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
SETDA KABUPATEN BULELENG

Nama Media : **BALI POST**

Kategori : **BANDARA**

Gubernur Surati Bupati Kumpulkan Data Yuridis Tanah Bandara

Singaraja (Bali Post) -

Pemerintah pusat sudah memastikan pembangunan Bandar Udara (Bandara) Buleleng dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Mengacu skema ini, lokasi bandara pun bisa dipastikan dibangun di darat di atas lahan milik Desa Pakraman Kubutambahan dengan luas sekitar 370 hektar. Pascakepastian pembangunan bandara itu, Gubernur Bali Wayan Koster telah bersurat kepada Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana agar mengumpulkan data yuridis tanah yang sudah disurvei untuk bandara tersebut. Menindaklanjuti surat itu, penelusuran data tanah milik Desa Pakraman Kubutambahan itu diserahkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Buleleng.

Bupati Putu Agus Suradnyana ketika dimintai konfirmasi usai sidang di gedung DPRD Buleleng, Senin (11/3), membenarkan pihaknya sudah diperintahkan oleh Gubernur Bali untuk menelusuri data tanah di Kubutambahan. Surat itu, kata Bupati, telah diterima sebelum hari suci Nyepi lalu. Pihaknya bahkan sudah menindaklanjuti dengan meminta BPN menelusuri data tanah yang akan dijadikan penyertaan modal dalam proyek Bandara Bali Utara itu. "Kalau tidak salah, suratnya masuk ke saya sebelum Nyepi. Setelah libur hari raya itu, saya sudah teruskan ke BPN guna menelusuri keberadaan tanah di sana (Kubutambahan - red). Bagaimana hasilnya, kita masih tunggu," katanva.

Sejauh ini pihaknya telah melakukan penelusuran untuk mengetahui kepastian luas tanah yang ada sekarang ini. Koordinat dan batas-batas penyandingnya juga perlu diketahui secara pasti. Data yuridis ini kemudian dilaporkan kepada Gubernur melalui surat jawaban yang dalam waktu dekat ini disampaikan kepada Gubernur Bali Wayan Koster. "Hanya itu perkembangan paling terbaru. Kami diminta mencari tahu di mana letak koordinat tanahnya, lintang berapa, siapa di sebelahnya (penyanding - red), dan kalau datanya sudah terkumpul, kami langsung menjawab surat Gubernur itu," jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, menyusul penetapan skema pembangunan bandara dengan KPBU, Menteri Perhubungan Republik Indonesia (Menhub-RI) Budi Karya Sumadi telah meninjau tanah milik Desa Pakraman Kubutambahan, 30 Desember 2018 lalu. Menhub melihat dari dekat lokasi yang merupakan tanah perbukitan dan tidak ada permukiman penduduk atau situs sejarah dan tempat ibadah (pura - red). Karena tanahnya berbukit, proses persiapan lahannya akan dilakukan dengan *cut and fill*. Dengan teknik itu, pemerintah memastikan tidak ada pemakaian material pemadatan lahan yang didatangkan dari luar daerah. Selain melihat lokasi bandara, Menhub Budi Karya Sumadi menyebutkan kalau proses lanjutan adalah penetapan lokasi (penlok) bandara.

Selain Menhub RI, Presiden RI Joko Widodo juga "mengutus" Staf Khusus Presiden Lenis Kogoya untuk meninjau lokasi bandara di kawasan Bukit Teletabis Kubutambahan pada 21 Februari 2019 lalu. Dalam kunjungannya itu, Lenis Kogoya menyambut baik dukungan Desa Pakraman Kubutambahan yang menyerahkan tanah adat kepada pemerintah untuk pembangunan infrastruktur perhubungan. Bahkan, dukungan luar biasa seperti itu baru pertama kali ditemukan di negara ini. Untuk itu, setelah mengetahui kondisi lahan, Lenis Kogoya pun menjanjikan akan melaporkan situasi itu kepada Presiden dan Menhub agar penlok bandara segera diterbitkan. (kmb38)

Nama Media : *Bali Post*

Kategori : *Sejarah*

Bale Agung, Situs yang Perlu Direstorasi

Tempat Kelahiran Ibu "Founding Father" NKRI Ir. Soekarno

Lingkungan Bale Agung, Kecamatan Buleleng tidak bisa dipisahkan dari perjalanan sejarah bangsa ini. Alasannya, kawasan itu menjadi cikal bakal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu, sangat strategis keberadaan Bale Agung itu mendapat atensi optimal. Pasalnya, hal itu tidak bisa dipisahkan dengan kampung kelahiran ibunda *founding father* NKRI Ir. Soekarno. Untuk menjaga dan melestarikan kawasan Bale Agung, Pemkab Buleleng menawarkan restorasi Bale Agung menjadi situs sejarah tanpa menghilangkan wujud aslinya. Lalu, bagaimanakah dan kapan rencana restorasi kawasan Bale Agung itu?

BUPATI Buleleng Putu Agus Suradnyana mengatakan hal itu saat menghadiri Ngembak Api Games. Agenda itu memang rutin diselenggarakan Keluarga Besar Bale Agung. Bupati belum lama ini menegaskan, kawasan Bale Agung sejatinya sebagai cikal bakal sejarah NKRI. Tempat itu merupakan tanah kelahiran ibunda Ir. Soekarno. Karena itu, Bale Agung potensial dijadikan situs pariwisata sejarah. Saat ini, pengembangan itu sudah dilakukan dengan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Bung Karno di lingkungan Sangket, Kelurahan Sukasada. Langkah awal ini sebagai upaya nyata pemerintah untuk lebih memperlihatkan

Bale Agung menjadi sebuah situs sejarah. Dengan desain pengembangan berkelanjutan, maka hal itu menjadi satu kawasan dengan RTH Taman Bung Karno dengan kawasan Bale Agung. Diyakini, restorasi itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bale Agung. "Masyarakat Bale Agung pasti akan bersatu mewujudkan hal tersebut," jelasnya.

Bupati menegaskan, apa yang dilakukan saat ini sudah sejalan dengan kebijakannya. Menurutnya, penataan kawasan Bale Agung dan pendukungnya menggunakan model pendekatan nilai historis. Hal itu karena Bale Agung dalam awal kemerdekaan NKRI bisa memberikan manfaat terhadap masyarakat

Buleleng khususnya, Bali bahkan Indonesia.

Dari dulu, dirinya terus mengupayakan Bale Agung itu idealnya memang direstorasi. Dipercaya, nilai historisnya dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Bale Agung. Dimulai dari RTH Bung Karno, Desa Beratan yang memiliki sejarah pertunangan dan kerajinan perak. Kemudian Bale Agung dengan nilai sejarah bangsa. Realitas itu diakui banyak pihak sangat potensial terkait peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. "Tinggal dipoles lagi sedikit saja, maka pasti memberikan manfaat luar biasa," ujarnya.

Bupati asal Desa Banyuatis Kecamatan Banjar ini menganalogi-

kan dengan keberadaan makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur (Jatim). Kalau saja tidak ada makam Bung Karno maka Blitar itu tidak terkenal seperti sekarang ini. Setidaknya, kawasan Bale Agung di Singaraja itu juga memiliki cikal bakal sejarah NKRI. Dalam hal ini bukan bermaksud mengomersialisasikan Bale Agung, tetapi ditinjau dari perspektif nilai historis, hal itu dapat mengingatkan khalayak di Indonesia bahwa Bale Agung adalah cikal bakal sejarah NKRI. "Bale Agung merupakan tonggak sejarah ibunda pejuang kemerdekaan NKRI, Bung Karno," jelasnya

Raden Soekemi Nekat Nikahi Rai Srimben

Situs Bale Agung tidak lepas dengan keberadaan orangtua Presiden pertama Ir. Soekarno. Itu merupakan bukti sejarah riil yang harus mendapat atensi. Bupati Buleleng sangat mengapresiasi hal itu lebih-lebih sejarah itu unik dan fenomenal, karena itu perlu dijaga keberadaannya

sepanjang masa. Sebab, di Bale Agung itulah pasangan tersebut menikah di masa lalu. Di tempat itu pula, ibunda Presiden pertama Republik Indonesia Rai Srimben tinggal. Kalau Rai Srimben tidak berjodoh dengan Raden Soekemi maka dipastikan tidak akan lahir Ir. Soekarno. Bisa jadi juga kemungkinan tidak ada NKRI ini. Melalui perspektif sejarah yang sangat bernilai itulah, Bale Agung itu bisa dikategorikan sebagai salah satu tempat cikal bakal lahirnya NKRI.

Raden Soekemi adalah seorang guru yang mengajar pada Sekolah Rakyat (SR) di Singaraja. Sekolah yang berada di Jalan Veteran Singaraja itu sekarang masih berdiri dan bernama SDN 1 Paket Agung. Raden Soekemi kemudian menikahi Rai Srimben dengan penuh cerita haru. Sebab, kala itu tidak ada persetujuan dari keluarga Rai Srimben. Meski demikian, Raden Soekemi nekat menikahi gadis pujaan hatinya hingga kemudian lahirlah proklamator Ir. Soekarno. (mud)

Nama Media : **BALI POST**

Kategori : **EKSEKUSI LAHAN**

Pemkab Buleleng Menangkan Gugatan Sengketa Tanah 300 Meter Persegi di Jalan Teratai

Singaraja (Bali Post) -

Sengketa tanah di Jalan Teratai, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng antara Pemkab Buleleng dengan Putu Deresnaguna dan kawan-kawan memasuki babak akhir. Setelah lama bergulir di meja hijau, Pemkab Buleleng akhirnya memenangkan gugatan sengketa itu. Dengan hasil itu, objek sengketa tanah seluas 300 meter persegi itu adalah sah milik pemkab.

Dari informasi yang dikumpulkan di lapangan Selasa (12/3) kemarin, sengketa ini bergulir sampai di Mahkamah Agung (MA). Putusan Peninjauan Kembali (PK) sifatnya *declaratoir* alias putusan yang tidak memberi penghukuman. Menyusul putusan itu, pada 6 September 2018, Pemkab kembali mengajukan gugatan atas putusan sebelumnya. Dari persidangan itu, pemkab memenangkan gugatan sengketa tanah tersebut sesuai putusan Pengadilan Negeri (PN) Singaraja Senin (4/3) lalu. Dengan putusan ini, pemkab mengusulkan pelaksanaan eksekusi kepada PN Singaraja.

Dalam amar putusannya, majelis

hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, mengabulkan gugatan penggugat sesuai amar putusan peninjauan kembali, dan menolak eksepsi tergugat II. Majelis hakim mengadili bahwa Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 16 Tahun 2009, luas 1.500 meter persegi tertera atas nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Buleleng yang terletak di Jalan Teratai, Kelurahan Banyuasri Singaraja adalah sah. Dinyatakan pula, objek sengketa seluas 300 meter persegi dengan batas-batas, utara tanah milik, selatan tanah Pemerintah Kabupaten Buleleng, timur tanah milik, bagian barat sungai/kali sah merupakan bagian tanah seluas 1.500 meter persegi sesuai Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 16 Tahun 2009, atas nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Buleleng yang terletak di Jalan Teratai, Kelurahan Banyuasri.

Menyatakan Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 16 Tahun 2009, luas 1.500 meter persegi, tertera atas nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Buleleng yang terletak di Jalan Teratai, Kelurahan Banyuasri Singaraja adalah

sah. Menyatakan perbuatan Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi menyertifikatkan objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 312 Tahun 2001 seluas 300 (tiga ratus) meter persegi atas nama Putu Deresnaguna yang terletak di Jalan Teratai, Kelurahan Banyuasri Singaraja adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat sebagaimana dimaksud pada amar Putusan Peninjauan Kembali No. 115 PK/Pdt/2017 dalam keadaan kosong, apabila perlu dengan bantuan alat negara (Polri).

Dikonfirmasi atas putusan itu, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekkab Buleleng, Bagus Gede Beratha, mengaku masih menunggu salinan putusan tersebut. Setelah itu, pihaknya segera mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada PN Singaraja. Menunggu salinan putusan, pihaknya juga menunjuk tim kuasa hukum pemkab yang akan

ditunjuk mewakili pemkab dalam pelaksanaan eksekusi itu.

"Benar sudah diputus, tetapi kita belum terima salinannya. Kami masih tunggu sembari kita tunjuk kuasa hukum untuk mewakili dalam pelaksanaan eksekusi nantinya," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemkab akan memanfaatkan lahan seluas dua hektar itu untuk pembangunan lapangan sebagai pengganti lapangan Ngurah Rai. Dalam perjalanannya muncul gugatan dari Putu Dresnaguna, warga kelurahan Banyuasri yang mengklaim lahan seluas 15 are untuk jalan menuju lahan milik pemkab di seberang sungai. Putusan PN Singaraja, Pengadilan Tinggi, dan Kasasi dimenangkan penggugat Putu Dresnaguna. Sementara, pada sidang PK dimenangkan Pemkab Buleleng. Hanya, putusan PK sifatnya *declaratoir*. Artinya, putusannya tidak bisa dilaksanakan. Atas kondisi itu, pemkab kembali melayangkan gugatan atas putusan sebelumnya. Hasilnya, pemkab kembali menang pada sengketa itu. (kmb38)

Nama Media : *BALI POST*

Kategori : *NORMALISASI SUNGAI*

Normalisasi Sungai Batu Pulu

BWS Bali-Penida Kerahkan Alat Berat

Singaraja (Bali Post) -

Banjir yang terjadi di alur Sungai (Tukad) Batu Pulu di Desa Pamaron, Kecamatan Buleleng, sesungguhnya dipicu sumbatan kayu gelondongan, rumpun bambu dan sampah, tepat di bawah jembatan Nasional Singaraja Gilimanuk. Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida melakukan upaya optimal untuk menormalisasi hal itu. Buktinya, BWS menurunkan alat berat untuk membersihkan alur sungai itu.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Buleleng Ida Bagus Suadnyana, Selasa (12/3) kemarin, mengatakan banjir yang merendam badan jalan dan rumah penduduk di pinggir jalan Desa Pamaron itu, terjadi setiap hujan deras. Akibatnya, alur sungai ini bertahun-tahun dangkal akibat material sedimentasi. Pasalnya, alur sungai itu tidak mampu menampung seluruh volume air dari daerah hulu. Sebab, aliran banjir menghanyutkan batang kayu, rumpun bambu, hingga sampah kiriman. Karena di bawah jembatan itu terdapat tiga

tiang pancang, yang menahan laju batang kayu atau rumpun bambu yang terbawa banjir itu. Akibatnya, air pun meluap. Hal itulah yang memicu terjadinya banjir di badan jalan hingga ke rumah penduduk.

"Luapan air di bawah jembatan itu bukan baru kali ini terjadi. Setiap hujan deras, air di sungai itu pasti meluap. Sampah itu tertahan karena ada tiang pancang. Nah sekarang, kami dibantu alat berat BWS, besok (Rabu, 13/3 - red), sungai itu kita normalisasi dan sampah penyumbat di bawah jembatan itu kita bersihkan," janjinya.

Mantan Kepala Satuan Polisi

Pamong Praja (Kasatpol PP) Pemkab Buleleng ini menambahkan, penanganan di sungai Batu Pulu itu tidak berhenti dengan cara menormalisasi alur sungai saja. Setelah normalisasi itu, BPBD akan berkoordinasi ke Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR). Ini dilakukan untuk mencari solusi permanen, sehingga luapan banjir di Sungai Batu Pulu itu, tidak terulang setiap musim hujan tiba. Pihaknya pun mengusulkan agar ada perbaikan konstruksi jembatan. Sehingga, ketika volume air bertambah tidak akan kembali tersumbat batang pohon,

rumpun bamboo, dan sampah. Hanya dengan cara itu, banjir dari luapan air sungai itu, akan bisa ditangani tuntas.

Penanganan Permanen

"Penanganan secara permanen akan segera kita usulkan ke pusat. Setelah kami berkali-kali melakukan pembersihan memang konstruksi di bawah jembatan itu menjadi pemicu meluapnya air sungai ketika hujan. Konstruksinya kami minta diubah. Strategi itu agar tidak lagi ada tiang pancang di tengah-tengah alur sungai yang justru dapat menghambat aliran air," jelasnya.

Terkait kerugian dampak bencana saat *sipeng* Nyepi 1941 lalu, sampai kemarin, BPBD masih menyempurnakan data kerugian akibat bencana banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang. Dari data yang sudah

masuk tercatat sebelas lokasi bencana. Dipastikan, lokasi itu bertambah. Ini karena masih ada kecamatan, desa hingga tokoh masyarakat yang baru melaporkan terjadinya bencana itu di wilayahnya. Selain menyempurnakan kerusakan karena bencana, Suadnyana mengaku penanganan darurat sudah dilakukan. Cara penanganannya seperti longsor yang menutup jalan di Desa Sudaji menuju Desa Menyali dan Desa Sawasan, itu sudah ditangani. Setelah itu jalan kembali bisa dilintasi kendaraan dengan nyaman.

"Kami masih menyempurnakan data-datanya. Sambil menunggu data tambahan, penanganan darurat sudah kita lakukan terutama untuk membersihkan jalan yang tertutup tanah longsor," tegasnya. (kmb38)